BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2001 atau tepatnya sejak berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien,efektif dan bertanggung jawab. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan kuantitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsive terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri(Bastian,2006:354).

Pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah.Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapinya dengan sedikit rasa khawatir. Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah(Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah,2010:65).

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang di pisahkan dan lain-lainnya Pendapatan Asli Daerah yang sah di kelola Pemda digunakan untuk mendanai belanja daerah (Rahardja Adisasmito,2011:6). Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi: Belanja Langsung dan Belanja tidak Langsung (Nunuy Nur Afiah,2009:15).Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung dianggarkan pada belanja SKPD yang melaksanaan atau terkait dengan program dan kegiatan.(Budi S. Purnomo,2009:44)

Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) Belanja tanah, 2) Belanja Peralatan dan mesin, 3) Belanja modal gedung dan bangunan, 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5) Belanja aset tetap lainnya, 6) Belanja aset lainnya (Abdullah &Halim, 2004 : 101).

Belanja modal merupakan prasayarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan

prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatakan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender. (Xabduh,2011)

Masalah umum yang terjadi terkait dengan Belanja Modal Bahwa Penyerapan belanja modal bulan September 2011 sebesar 27,9 persen dari alokasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2011. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui angka realisasinya sebesar 27,9 persen.harus melakukan upaya perbaikan agar penyerapan anggaran, khususnya belanja modal, bisa lebih tinggi.penyerapan belanja modal yang masih rendah menjadi perhatian pemerintah, ini dikarenakan terkait dengan pembangunan dan pembenahan sarana infrastruktur. Apalagi pola pembiayaan proyek dengan keterlibatan swasta atau melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS) ternyata tidak berjalan seperti yang diharapkan. Dalam perkembangan KPS tidak seperti yang kita harapkan penyerapan belanja modal yang rendah disebabkan masih ada kontraktor proyek yang belum melakukan penagihan. Padahal pemerintah tidak ada kendala dalam proses pencairan anggaran. (Bayu,2011)

Fenomena yang terjadi di Bappeda bandung realisasi belanja modal dari tahun 2002-2006 serta 2010 mengalami penurunan.hal ini disebabkan oleh

kurangnya kinerja dan perencanaan.Padahal dalam Standar Akuntansi Pemerintah telaah kritis PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memperediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD). Dapat dilihat bahwa realisasi harus sesuai dengan anggarannya, sedangkan dari tabel diatas antara anggaran dengan realisasi tidak sama.

Pertumbuhan ekonomi atau laju pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran atau indicator makro ekonomi yang bisa menggambarkan perkembangan atau tingkat kinerja ekonomi suatu eilayah (BPS Provinsi Jawa Barat.2009:41).Masalah yang muncul pada pertumbuhan ekonomi,yaitu dari sector pertanian adalah sub sector pertenakan dan kehutanan masing-masing sebesar-o,55 persen dan -5,23 persen. Adanya gangguan baik kekeringan maupun serangan hama selama 2008 serta dari sector pengangkutan dan komunikasi, dengan pertumbuhannya -0,30 persen hal ini disebabkan karena kinerja sector ini sangat tergantung sekali akan perubahan harga BBM yang mengalami kelonjakan harga selama tahun 2008. (BPS Provinsi Jawa Barat.2009:46)

Dengan mengembangkan perekonomian yang berorientasi dan kompotensi serta produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian, kehutanan, kelautan

dan pertambangan dapat meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan melayani kebutuhan masyarakat. Dengan tercapainya hal tersebut dapat menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran,pengurangan subsidi dan pinjaman luar negri secara bertahap serta penghematan pengeluaran sehingga dapat mengoptimalkan dalam penganggaran Belanja Modal (S.sumarsono,2001:156)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Mahmudi,2007:68)

Permasalahan di kawasan sentra industry masing-masing berbeda. Kawasan cigondewah, masih belum dilengkapi sarana pendukung seperti jalur hijau,street furniture, promosi kawasan, PJU,dll. Untuk kawasan Binongjati, yaitu keberadaab sentra di kawasan sempit, membutuhkan akses jalan selebar 3 meter, masih adanya lahan yang belum dibebaskan seluas 10.000m2, terhalang bangunan pribadi dan PJU.Sedangkan untuk kawasan Cihampelas, permasalahan ada pada PKL yang berjualan di bahu jalan, tingkat kemacetan yang tinggi, tempat parkir tidak memadai serta kerusakan jalan dan tumbuhnya *arcadetook* yang tidak terkendali. Untuk kawasan surapati (suci), permasalahan terletak pada posisi kawasan yang masuk ke dalam rencana proyek tol kota (Bandung Intra Urban Toll Road/BIURT), dan bangunan kios yang pada umumnya berada dalam sepadan jalan dan tidak memilki IMB.

Pada Peraturan Daerah Kota Bandung,untuk mendorong dan merangsang tercapainya peningkatan pelayanan aparatur pemeintah daerah kepada masyarakat yaitu; pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Pasala 13 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah,pemerintah pelayanan aparatur Pemerintah daerah yang dalamnya diambil dari hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (Lien,2011)

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat selama sepuluh tahun terakhir, dari tahun aanggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2010 yang dapat di lihat dari pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli DaerahProvinsi Jawa Barat

Tahun 2001 sampai Tahun 2010

tahun	anggaran	realisasi	%
2001	1,896,086.00	1,211,417.73	64%
2002	1,184,619.50	1,551,490.96	131%
2003	1,537,980.99	2,164,337.44	141%
2004	2,028,447.05	2,846,800.74	140%
2005	2,619,535.10	3,604,767.56	138%
2006	3,399,855.35	3,748,404.05	110%
2007	3,621,803.00	4,221,667.00	117%
2008	4,055,117.00	4,609,148.00	114%
2009	5,176,292.00	5,099,621.00	99%
2010	5,622,862.00	6,252,649.00	111%

Sumber :Provinsi Jawa Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun meningkat. Dan Pendapatan Asli Daerah yang melebihi dari Anggaran yaitu pada tahun 2002, 2003, 2004,2005,2006,2007,2008 dan 2010. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2009 pada retribusi daerah.menandakan tidak efektifnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

"Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja" (Bahtiar Arif, Muchlis &Iskandar ,2009:171).

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **"PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN**

BELANJA MODAL (Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan BappedaPemerintah Provinsi Jawa Barat)”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kurangnya kinerja dan perencanaan pada pengalokasian belanja modal.
2. Adanya penurunan pada sektor pertanian, pengangkutan dan komunikasi.
3. Adanya penurunan pendapatan asli daerah yaitu pada retribusi daerah

1.2.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. BagaimanaPertumbuhan Ekonomi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana Pengalokasian AnggaranBelanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa Besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis informasi beserta data yang relevan mengenai PengaruhPertumbuhan Ekonomi, penerapan Pendapatan Asli Daerah, dan Pengalokasian AnggaranBelanja ModalBadan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Pengalokasian AnggaranBelanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetatui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial dan simultan terhadapPengalokasian Anggaran Belanja Modal padaBadan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebagai informasi mengenai seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadapPengalokasian Anggaran Belanja

Modal.Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga akan menjadi lebih baik dan berkembang.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Pengembangan Ilmu

   Dapat dijadikan pengembangan ilmu penelitian bagi peneliti selanjutnya tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

2. Bagi peneliti

   Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadapPengalokasian Anggaran Belanja Modal.

3. Bagi Peneliti Lain

   Dapat dijadikan sebagai bahan referensi pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadapPengalokasian Anggaran Belanja Modal..

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi dimana penulis melakukan penelitian untuk tujuan penyusunan penelitin ini adalah Badan Pusat Statistik Jawa Barat yang beralamtkan dijl.P.H Mustofa No.43

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan September 2011 sampai dengan Februari 2012.

Tabel 1.3

Pelaksanaan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Sep 2011	Ock 2011	Nov 2011	Des 2011	Jan 2012	Feb 2012
I	**Tahap Persiapan :**						
	a. Membuat outline dan proposal UP	■					
	b. Mangambil formulir penyusunan skripsi	■					
	c. Menentukan tempat penelitian	■	■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	a. Bimbingan UP		■				
	b. Pendaftaran seminar UP		■	■			
	c. Seminar UP			■			
	d. Revisi UP			■			
	e. Membuat outline dan proposal skripsi				■		
	f. Penelitian perusahaan				■	■	
	g. Penyusunan skripsi				■	■	
	h. Bimbingan skripsi					■	■
III	**Tahap Pelaporan :**						
	a. Menyiapkan draft skripsi						■
	b. Sidang akhir skripsi						■
	c. Penyempurnaan laporan skripsi						■